

Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan Internal dan Transparansi terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jakarta

Siti Syifani Kusuma Ayu, Adam Zakaria, Muhammad Yusuf

Universitas Negeri Jakarta

Abstract

This research was conducted to determine the influence of public sector accounting, internal supervision and transparency on the performance of the Jakarta Provincial Government's financial reports. This research uses the Jakarta Provincial Inspectorate as the population. This research sample used 45 respondents from the results of distributing questionnaires carried out at the Jakarta Provincial Inspectorate. Data were processed using SPSS software and analyzed using multiple linear regression analysis. The results of this research show that human resource quality competency, accountability and supervision have a positive effect on the quality of the financial report performance of the Jakarta Provincial Government

Keyword: Public Sector Accounting, Internal Control, Transparency

Corresponding Author :

Siti Syifani Kusuma Ayu

syifanika@gmail.com

1. Pendahuluan

Sejak tahun 1998-an, masyarakat Indonesia mengalami perubahan yang besar dan cukup mendasar dalam bidang pemerintahan. Perubahan tersebut ditandai dengan meningkatnya keinginan diterapkannya akuntabilitas dan transparansi kinerja akan pengelolaan sektor publik. Ungkapan *good and clean governance* dapat diinterpretasikan sebagai perwujudan indikator kejujuran pemerintah. Pemerintahan yang bersih atau *Good Governance* dicirikan oleh tiga pilar utama yang merupakan landasan yang saling bergantung. Tiga elemen dasar tersebut adalah partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Tujuan dilakukannya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah untuk mengetahui kemampuan mencapai visi, misi dan tujuan organisasi guna meningkatkan terselenggaranya pemerintahan yang efektif, lebih produktif, bersih dan bertanggung jawab.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kebebasan memberdayakan pemerintah daerah tentu saja memerlukan perpaduan antara efisiensi operasional dan transparansi pengelolaan keuangan. Pemerintah Jakarta merupakan salah satu unit pelaporan yang wajib menyampaikan laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil kajian BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terdapat permasalahan inventarisasi aset yang tidak hanya terjadi satu kali saja, hampir setiap tahun Pemprov menghadapi permasalahan yang sama. Permasalahan ini selalu muncul karena adanya keterlibatan pihak-pihak yang menghalangi penyerahan harta. Berdasarkan peraturan Gubernur Provinsi Jakarta Nomor 76 Tahun 2008 yang mengatakan bahwa Pengembang atau pemegang izin penggunaan tanah (SIPPT) wajib menyerahkan propertinya kepada Pemprov Jakarta untuk menyerahkan aset utilitas sosial (fasos) dan utilitas umum (fasum). Kenyataan bahwa Jakarta sudah meraih penghargaan Kewajaran Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sebanyak enam kali berturut-turut, tidak menghilangkan fakta lain bahwa ada masalah akuntabilitas di Pemprov Jakarta yaitu pencatatan inventarisasi aset. Penerapan akuntansi sektor publik bertujuan untuk mencatat, melaporkan, dan mengelola keuangan entitas sektor publik, seperti pemerintah daerah, lembaga pemerintah pusat, dan badan-badan lainnya yang bersifat publik. Dalam penerapan akuntansi sektor publik, pemerintah dalam pelaporan keuangannya harus menyediakan informasi sejelas-jelasnya.

Menurut PP No 71 tahun 2010 Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan, Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. Transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dana desa, karena penyebaran berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengambil keputusan, misalnya dengan rapat desa yang dilakukan secara musyawarah. Selain itu, transparansi dapat mempersempit peluang korupsi dalam lingkup pemerintah desa dengan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut.

2. Kajian Pustaka

Menurut Novarian dan Kurniawan (2020) Kinerja sejatinya adalah pencapaian sebuah kegiatan yang telah melebihi standar atau sasaran yang ditetapkan. Di dalam konteks organisasi pemerintah, kinerja juga dapat bermakna kegiatan yang dilaksanakan telah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, sebagai *Stakeholder* utama pemerintah. Kinerja pemerintah juga didefinisikan sebagai hasil dari kegiatan dan program pemerintah yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur (PP Nomor 8 Tahun 2006). Berdasarkan pengertian tersebut kinerja instansi pemerintah merupakan hasil yang telah dilakukan pemerintah yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Dimensi kinerja dalam instansi pemerintah ditunjukkan ketika instansi tersebut dapat memperoleh *input* dengan harga yang ekonomis, dapat melaksanakan kegiatan dengan efisien dan dapat menghasilkan *output* sebagaimana yang diharapkan. Kinerja di dalam sebuah instansi pemerintah itu sendiri meliputi kinerja dalam aspek keuangan, kinerja dalam aspek kuantitatif dan kinerja dalam aspek kualitatif. Dalam penerapan akuntansi sektor publik, pemerintah dalam pelaporan keuangannya harus menyediakan informasi se jelas-jelasnya.

Menurut PP No 71 tahun 2010 Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan, Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang undangan. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti membuat 3 hipotesis berbeda. Akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Adanya penerapan transparansi pada setiap perangkat daerah bisa meningkatkan kinerja pemerintah dengan baik dengan melakukannya keterbukaan informasi yang relevan maupun akurat.

H1: Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan (Yahya, 2016). semakin baik pengawasan intern yang dilakukan Pemerintah maka akan semakin baik pula kinerja instansi pemerintah, bahwa setiap peningkatan pelaksanaan pengawasan intern akan memberikan peningkatan kinerja di lingkungan pemerintah. Pengawasan intern (meliputi: lingkungan

pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan) yang dilaksanakan dengan baik sesuai aturan yang berlaku maka dapat menekankan asumsi-asumsi penyimpangan perilaku dan sebagai prosedur yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam organisasi dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta yang dimiliki pemerintah, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi dalam usaha dan membantu mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan, sehingga pengelolaan keuangan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan dapat berjalan dengan baik.

H2 : Pengawasan Internal berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah

Permendagri Nomor 113 tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi adalah bahwa prosedur atau tata cara, penyelenggaraan pemerintahan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta. Dengan adanya transparansi maka publik dapat melihat kemajuan dalam kinerja instansi pemerintah

H3 : Transparansi berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah

3. Metodologi Penelitian

Peneliti terlebih dahulu melakukan observasi sehingga pada penelitian ini dilakukan di Pemerintah Provinsi Jakarta Khususnya Badan Pengelola Keuangan Jakarta. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan permasalahan mengenai Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan Internal Dan Transparansi Terhadap Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Jakarta. Waktu penelitian ini dimulai dari mengumpulkan data yang terkait sampai hasil penelitian memerlukan waktu sekitar 3 (tiga) bulan yaitu pada bulan September 2023 sampai dengan Desember 2023. Pada penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Menurut menurut Unggul Purwihedi (2022) dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Prinsip dan Praktik” menyebutkan bahwa penelitian kuantitatif adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan survei, eksperimen, dokumen perusahaan maupun data-data kuantitatif yang dipublikasikan. Metode kuantitatif bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Siti Rapinggah, Dkk (2022) penelitian kuantitatif adalah penyelidikan teroganisir tentang fenomena atau permasalahan melalui pengumpulan data numerik dan pelaksanaan teknik statistic atau komputasi. Sumber penelitian kuantitatif adalah paradigma positivisme yang menganjurkan pendekatan statistik seperti statistic inferensial, pengujian hipotesis, pengacakan desain eksperimental dan kuisioner dengan variasi terbatas dan jawaban yang sudah ditentukan sebelumnya.

Pengembangan instrumen yang dilakukan dalam penulisan penelitian ini terdiri dari variable independen yaitu Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1), Pengawasan Internal (X2), Transparansi (X3) dan variabel dependen yaitu kinerja laporan keuangan (Y). Penyusunan instrumen dalam penelitian ini berupa definisi operasional, indikator, item pertanyaan dan alat ukur penelitian. Dalam penulisan ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data-data tersebut adalah data yang diolah dalam bentuk angka yang sebelumnya sudah didapat dari skala kuesioner yang sudah disebarkan oleh peneliti melalui auditor Inspektorat Jendral Provinsi Jakarta dan selanjutnya data diolah menggunakan software SPSS 26. Kuesioner yang dibagikan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah kuesioner dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan oleh peneliti. Sumber data dari penelitian ini adalah Staf Akuntansi Pemerintah Provinsi Jakarta.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Descriptive Statistics							
	N	Range	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
Akuntansi Sektor Publik	10	16	126	142	133.90	1.574	4.977
Pengawasan Internal	10	15	127	142	134.00	1.680	5.312
Transparansi	10	15	133	148	140.20	1.879	5.940
Kinerja Instansi Pemerintah	10	20	126	146	138.70	2.028	6.413
Valid N (listwise)	10						

Pada tabel diatas menjelaskan hasil analisis statistik deskriptif dari seluruh variabel bebas, dan variabel terikat yang terdapat pada penelitian ini. Hasil analisis ini menggunakan jumlah responden sebanyak 30 orang atau jumlah sampel yang terdapat pada penelitian ini. Dalam statistik deskriptif terdapat nilai minimum, maksimum dan rata-rata (mean). Nilai minimum yaitu nilai terkecil dalam kumpulan data, lalu nilai maksimum adalah nilai terbesar dalam kumpulan data dan mean adalah nilai rata-rata dari kumpulan data.

Descriptive Statistics								
	N	Range	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation	Variance
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Statistic
Pengawasan Internal	10	15	127	142	134.00	1.680	5.312	28.222
Valid N (listwise)	10							

Dengan total keseluruhan butir pernyataan dalam mengukur variabel (X1) dalam penelitian ini sebanyak 10 butir pernyataan yang masing-masing pernyataan diberikan nilai dalam rentang satu sampai dengan lima. Pernyataan yang disusun tersebut terdapat pernyataan yang bersifat positif, ataupun pernyataan bersifat negatif dengan tujuan agar hasil data yang didapatkan lebih valid.

Descriptive Statistics							
	N	Range	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
Transparansi	10	15	133	148	140.20	1.879	5.940
Valid N (listwise)	10						

Pada tabel diatas menampilkan hasil analisis statistik deskriptif untuk variabel Pengawasan Internal (X2). Berdasarkan keseluruhan jawaban yang dihasilkan dari responden, nilai minimum yang dihasilkan pada variabel ini yaitu sebesar 127, dan nilai maksimal dalam variabel ini yaitu sebesar 142 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 134,00 dan nilai standar deviasi yang didapatkan sebesar 5.312.

Descriptive Statistics							
	N	Range	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
Kinerja Instansi Pemerintah	10	20	126	146	138.70	2.028	6.413
Valid N (listwise)	10						

Pada tabel diatas menampilkan hasil analisis statistik deskriptif untuk variabel Transparansi (X3). Berdasarkan keseluruhan jawaban yang dihasilkan dari responden, nilai minimum yang dihasilkan pada variabel ini yaitu sebesar 133, dan nilai maksimal dalam variabel ini yaitu sebesar 148 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 140,20 dan nilai standar deviasi yang didapatkan sebesar 5,940.

Pada tabel tersebut menampilkan hasil analisis statistik deskriptif untuk variabel Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Berdasarkan keseluruhan jawaban yang dihasilkan dari responden, nilai minimum yang dihasilkan pada variabel ini yaitu sebesar 126, dan nilai maksimal dalam variabel ini yaitu sebesar 146 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 139,70 dan nilai standar deviasi yang didapatkan sebesar 6.413.

a. Pengaruh Akuntansi Sektor Publik terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Penerapan akuntansi sektor publik juga berarti pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan, Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. Hipotesis yang pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Karena berdasarkan dari hasil uji yang telah dilakukan dalam variabel akuntansi sektor publik mempunyai pengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah

b. Pengaruh Pengawasan Internal terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan (Yahya, 2016). Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa H2 diterima dan disimpulkan bahwa pengawasan internal berpengaruh positif terhadap kinerja instansi

pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi lebih kecil dan nilai koefisien mempunyai nilai positif yang artinya pengawasan internal memiliki pengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Maka badan pengelola keuangan telah memberikan pertanggungjawaban melakukan pengawasan terhadap laporan keuangannya.

c. Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Permendagri Nomor 113 tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Hasil hipotesis yang ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa Transparansi berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan dalam variabel transparansi bahwa nilai signifikansi lebih kecil dan nilai koefisien mempunyai nilai positif yang artinya transparansi memiliki pengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

5. Kesimpulan, Implikasi, Keterbatasan Penelitian dan Rekomendasi bagi peneliti selanjutnya

a. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh penerapan akuntansi sektor publik, pengawasan internal dan transparansi terhadap kinerja instansi pemerintah. Pada penelitian ini, sampel yang diambil atau responden yang dituju, yaitu staff akuntansi BPKD provinsi Jakarta, sebagai pengelola keuangan. Dalam penelitian yang dilakukan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner, dimana jumlah responden yang mengisi kuesioner pada penelitian ini yaitu sebanyak 30 responden.

b. Implikasi

Bagi badan pengelola keuangan, peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai evaluasi untuk mempertahankan dan atau meningkatkan laporan keuangan yang akuntabel dan laporan audit yang berkualitas serta dapat meningkatkan pengawasan internal dan juga agar pencapaian kinerja badan pengelola keuangan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun.

Bagi peneliti dan akademisi, peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kinerja instansi pemerintah, dan sebagai pelengkap untuk penelitian terdahulu mengenai kinerja instansi pemerintah. Dan yang ingin meneliti tentang kinerja instansi pemerintah disarankan untuk dapat menambah variabel-variabel lainnya yang berhubungan dengan kinerja instansi pemerintah. Tidak hanya sebatas pada variabel-variabel yang peneliti ambil untuk diteliti

c. Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan hanya menggunakan data kuesioner sebagai instrumen penelitian yang berdasarkan persepsi jawaban responden, sehingga data yang didapatkan tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya, dan menimbulkan jawaban yang mengambang karena kurang fokusnya responden dalam menjawab pernyataan yang diberikan.

d. Rekomendasi bagi peneliti selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang penerapan akuntansi sektor publik disarankan untuk dapat menambah variabel-variabel lainnya yang berhubungan dengan kinerja instansi pemerintah. Tidak hanya sebatas pada variabel-variabel yang peneliti ambil untuk diteliti.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh penerapan akuntansi sektor publik, pengawasan internal dan transparansi terhadap kinerja instansi pemerintah. Pada penelitian ini, sampel yang diambil atau responden yang dituju, yaitu staff akuntansi BPKD provinsi Jakarta, sebagai pengelola keuangan. Dalam penelitian yang dilakukan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner, dimana jumlah responden yang mengisi kuesioner pada penelitian ini yaitu sebanyak 30 responden.

Bagi badan pengelola keuangan, peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai evaluasi untuk mempertahankan dan atau meningkatkan laporan keuangan yang akuntabel dan laporan audit yang berkualitas serta dapat meningkatkan pengawasan internal dan juga agar pencapaian kinerja badan pengelola keuangan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun.

Penelitian yang dilakukan hanya menggunakan data kuesioner sebagai instrumen penelitian yang berdasarkan persepsi jawaban responden, sehingga data yang didapatkan tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya, dan menimbulkan jawaban yang mengambang karena kurang fokusnya responden dalam menjawab pernyataan yang diberikan.

6. Daftar Pustaka

- Agoes, S. (2017). *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik* (5th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, I. (2020). *Manajemen Keuangan Publik* (1st ed.). Yogyakarta: Andi.
- Hartoto, Tatmimah, I., Endraria, Muzayyanah, Sriyani, Djasuli, M., Rahmawati, I., Lestari, H. D., Dewi, M. S., Setyagustina, K., Nurdialy, M., Fitri, S. A., & Ardhiarisca, O. (2023). *Akuntansi Sektor Publik* (1st ed.). Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik - Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Purwohedi, U. (2022). *Metode Penelitian : Prinsip dan Praktik*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Rosini, I. (2023). *Metode Penelitian Akuntansi Kuantitatif dan Kualitatif*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Saputra, D. N., Listyaningrum, N., Apriani, Rokhayati, T., Asnah, & Leuhoe, Y. J. I.

(2022). *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. Palu: Feniks Muda Sejahtera.